

**KETERPILIHAN ANDI NILAWATI SEBAGAI KEPALA DESA  
DI DESA TOMPONG PATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



**LIDIA ASTUTI  
E041201064**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**KETERPILIHAN ANDI NILAWATI SEBAGAI KEPALA DESA**  
**DI DESA TOMPONG PATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

**LIDIA ASTUTI**

**E041201064**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**HALAMAN PENGAJUAN**  
**KETERPILIHAN ANDI NILAWATI SEBAGAI KEPALA DESA**  
**DI DESA TOMPONG PATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

LIDIA ASTUTI

E041201064

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**DEPERTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

#### SKRIPSI

"KETERPILIHAN ANDI NILAWATI SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA TOMPONG  
PATU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE"

LIDIA ASTUTI

E041201064

Skrripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana S1 pada 24 April 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:  
Pembimbing Utama

Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.  
NIP. 197308131998022901

Mengetahui:  
Pembimbing Pendamping.

Ummi Suci Fathiya Bailusey, S.IP., M.Si  
NIP. 199205022019044001

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sahmah Nadir, S.IP., M.Si  
NIP. 1969212311990031023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Keterpilihan Andi Nilawati sebagai Kepala Desa di Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing ibu Dr. Gustiana A Kambo, S.IP, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 April 2024

Yang Menyatakan,



Lidia Astuti

E041201064

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Keterpilihan Andi Nilawati sebagai Kepala Desa di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone." Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.Pol) pada Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Andi Bakkareng dan Ibu Hj. Andi Muliati yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tak henti yang telah kalian berikan sepanjang hidupku terutama doa dan duit. Kepada saudara Laki-laki Andi Rusdi dan Andi Arman yang tidak terlalu berkontribusi pada skripsi ini tapi sangat berkontribusi pada hidup penulis. terselesaikannya skripsi ini berkat dari bantuan oleh banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor beserta jajarannya di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberi ruang pada penulis di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si., Prof. Dr. Suparman, M.Si, dan Dr. Muhammad Iqbal Sultan, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS viii yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan akademik dan kemahasiswaan.
4. Alm Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, atas dedikasinya sebagai Ketua Departemen yang luar biasa dan telah menjadi orang tua penulis di kampus selama perkuliahan dan membantu kelancaran administrasi akademik dan terima kasih kepada Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, yang telah bersedia mengambil alih peran penting ini.
5. Ibu Gustiana A. Kambo, M.Si, dan Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga.
6. Bapak Haryanto, S.IP., M.A selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. Bapak Haryanto, S.IP, M.A, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Ibu Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP, M.Si yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang administrasi selama penulis menjadi Mahasiswa.
9. Keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah memberikan wadah pembelajaran selama perkuliahan.

10. Teman-teman Dinamis 2020. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dalam melakukan berbagai proses selama perkuliahan. adi mahasiswa.
11. Teman-teman Ilmu Politik 2020. Terima kasih telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan.
12. Kepada teman-teman KKNT GEL.110 Posko Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang telah memberi pengalaman dan kenangan yang berharga bagi penulis.
13. Terima kasih Kepada Alda Winda selama hampir 4 tahun yang selalu kebersamai dan membantu penulis di kampus selama menjadi Mahasiswa. Kepada Marlina, septi, umi, feri, mail, bahrul, pista, luki telah menjadi teman random dan segala situasi dan kondisi.
14. Kepada Bapak Syamsuddin dan Ibu Maemunah selaku tuan rumah dan seperti saya anggap seperti orang tua sendiri selama KKN. Serta kepala desa dan masyarakat desa bua.
15. Terima Kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktunya dan siap untuk memberikan keterangannya.
16. Terima kasih kepada Muh Fitrah Fauzil Adhim.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan bantuannya. Semoga semoga bantuan dan keikhlasannya mendapatkan balasan dari Allah SWT.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 24 Februari 2024  
Penulis,

**Lidia Astuti**

## ABSTRAK

LIDIA ASTUTI. NIM E041201064. **Keterpilihan Andi Nilawati sebagai Kepala Desa Di Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone** (dibimbing oleh Gustiana A. Kambo dan Ummi Suci Fathiya Bailussy).

**Latar belakang.** Andi Nilawati mampu menjadi kepala desa berbasis perempuan pertama di Desa Tompong Patu yang sebelumnya desa ini hanya dipimpin oleh laki-laki. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab keterpilihan Andi Nilawati dalam memegang peran kepemimpinan di tingkat desa. **Metode.** Dalam upaya memberikan penjelasan dan makna terhadap temuan dalam penelitian ini, studi menggunakan teori modal simbolik diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Teori ini menguraikan dua aspek, yakni prestise (status dan penghargaan) dan penghormatan (etika dan norma) . Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami jenis studi yang melibatkan kepala desa perempuan pertama di Desa Tompong Patu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan Andi Nilawati tersebut. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal simbolik yang digunakan pada keterpilihan Andi Nilawati sebagai kepala desa yaitu prestise dan penghormatan. Prestise mengarah pada dua hal, yaitu status dan penghargaan. Status dimaknai karena sebagai perempuan, status dimaknai karena sebagai anak mantan kepala desa dan memiliki profesi sebagai tenaga kesehatan di bidang gizi khususnya menyangkut pada kesehatan masyarakat. Sedangkan penghargaan dimaknai sebagai pemimpin inklusif yang tidak membedakan masyarakat. Sementara itu untuk modal simbolik penghormatan, terdiri dari aspek etika dan norma. Etika tercermin dalam sikapnya yang ramah dan sopan. Sedangkan norma atau adat istiadat dalam masyarakat masih mengedepankan pemilihan pemimpin dari keturunan Bangsawan. **Kesimpulan.** Terpilihnya Andi Nilawati sebagai kepala desa perempuan menggambarkan bagaimana modal simbolik memainkan peran penting dalam dinamika kepemimpinan perempuan di tingkat desa, yang memperkuat inklusi gender dan menghadirkan perubahan dalam tatanan sosial masyarakat desa.

Kata Kunci : Perempuan, Kekuatan politik, Kepala Desa, Pilkades

## ABSTRACT

LIDIA ASTUTI. NIM E041201064. **The Election of Andi Nilawati as Village Chief in Tompong Patu Village, Kahu Subdistrict, Bone Regency** (Supervised by Gustiana A. Kambo and Umami Suci Fathiya Bailussy).

**Background.** Andi Nilawati's election as the first female village chief in Tompong Patu Village, previously led exclusively by men, marks a significant shift in local leadership dynamics. **Aim.** This research aims to understand the reasons behind Andi Nilawati's election to the village leadership role. **Method.** Drawing on Pierre Bourdieu's theory of symbolic capital, this study explores the aspects of prestige (status and recognition) and respect (ethics and norms) influencing Andi Nilawati's election. The research employs a descriptive qualitative approach to analyze and understand the unique context of having the first female village chief in Tompong Patu Village. Data collection involves interviews and documentation to gain deeper insights into Andi Nilawati's leadership. **Results.** The findings indicate that Andi Nilawati's election was influenced by symbolic capital, specifically prestige and respect. Prestige is manifested in her status as a woman, being the daughter of a former village chief, and her profession as a healthcare worker specializing in community health and nutrition. Additionally, her recognition stems from her inclusive leadership style that transcends societal divisions. Respect, in terms of symbolic capital, encompasses ethical behavior and adherence to societal norms, although traditional norms still favor leadership succession from noble lineage. **Conclusion.** Andi Nilawati's election highlights the role of symbolic capital in shaping the leadership dynamics of women at the village level, fostering gender inclusivity, and bringing about social change in rural communities.

Keywords: Women, Political Power, Village Chief, Village Chief Election

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II</b> .....	<b>5</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
1.1 Konsep Keterpilihan .....	5
1.2 Kekuatan Modal Politik Andi Nilawati pada Pemilihan Kepala Desa .....	6
1.3 Teori Modal Simbolik.....	7
1.4 Penelitian Terdahulu .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Skema Berfikir.....	12
<b>BAB III</b> .....	<b>13</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	13
3.2 Dinamika Pemilihan Kepala Desa.....	13
3.3 Lokasi dan Objek Penelitian.....	15
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.6 Informan Penelitian .....	16
3.7 Teknik Analisis Data.....	17
<b>BAB IV</b> .....	<b>18</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	18
4.2	Keadaan Geografis Desa Tompong Patu .....	18
4.3	Profil Andi Nilawati .....	21
4.4	Dinamika Pemilihan Kepala Desa Tompong Patu .....	21
<b>BAB V</b>	.....	<b>24</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>24</b>
5.1	Penyebab Terpilihnya Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Tompong Patu .....	24
5.1.1	Prestise.....	25
5.1.2	Penghormatan .....	30
<b>BAB VI</b>	.....	<b>38</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>38</b>
6.1	Kesimpulan .....	38
6.2	Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>42</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3.1 Peta Administratif Desa Tompong Patu .....	35
Gambar 4.4.1 Andi Nilawati .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.6.1 Informan Penelitian .....	27
Tabel 4.3.1 Batas Wilayah Administratif Desa Tompong Patu .....	34
Tabel 5.1.2.1 Jumlah Suara pada Pemilihan Kepala Desa .....	5

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat berhak memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum. Pemilihan merupakan bentuk paling dasar dari ekspresi politik dan merupakan fondasi utama bagi stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi. Pemilihan umum adalah proses dimana rakyat memilih pemimpin mereka dengan suara terbanyak.

Dalam pemilihan harus terkandung beberapa prinsip yakni kebebasan individu, hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminatif baik itu agama, etnis, gender, serta adanya kesempatan untuk berpartisipasi lewat elemen kompetisi. Sistem negara demokrasi memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk berpikir dan berbicara untuk kepentingan bersama. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi demi kemajuan bangsa.

Kesetaraan dalam Undang-Undang membuka ruang baru terhadap eksistensi peran perempuan di Indonesia. Sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Indonesia seutuhnya. Gambaran mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan di ranah publik di Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan politik masih terjadi ketimpangan.

Laki-laki masih mendominasi baik di tataran lokal maupun nasional. Berdasarkan survei statistik politik tahun 2017 dari Badan Statistik Nasional menyatakan bahwa kaum laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan kaum perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, khususnya di provinsi sulawesi selatan kategori tergolong rendah dengan keterwakilan perempuan 18,28% dan untuk keterlibatan perempuan sebagai kepala desa pada tahun 2018 sebesar 4,9%. Tradisi masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkis atau mengedepankan laki-laki dan ditambah anggapan bahwa politik bukan untuk perempuan merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan.

Pandangan budaya di Indonesia melihat seorang perempuan adalah sukses apabila keluarganya juga terurus dan berhasil. Disisi lain, politisi perempuan dinilai terlibat dalam politik sebagai aktivitas sampingan karena keluarganya sudah terpenuhi kebutuhannya. Faktor lain yang membuat perempuan Indonesia kurang meminati dunia politik adalah anggapan tentang politik yang dikaitkan negatif seperti kotor, korupsi dan licik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Fauziyah. (2015). *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: LKiS.

<sup>2</sup> Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Ketidaksetaraan menyebabkan laki-laki mendominasi peran utama dalam berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan sering kali menduduki posisi nomor dua. Walaupun pada prinsipnya ada upaya untuk memberi peluang pada partisipasi perempuan dalam politik, masalah yang masih dihadapi adalah kesiapan perempuan

untuk aktif terlibat dalam arena politik. Selain itu, faktor sejarah dan budaya membuat perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kekuasaan, baik dalam skala personal maupun dalam sistem pemerintahan.<sup>3</sup> Ini adalah hasil dari pembentukan budaya dan tradisi yang menghasilkan pelebelan tertentu terhadap perempuan, yang sudah menjadi bagian integral dalam masyarakat, terutama di Kabupaten Bone. Hal tersebut bisa di lihat dari historis kepemimpinan di Kabupaten Bone yang selalu di pimpin oleh laki-laki dan keterunan bangsawan.

Keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis. Undang Undang No. 68 Tahun 1958 menyatakan dengan jelas bahwa perempuan mempunyai hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum serta mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan tugas-tugasnya dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan penambahan pasal 28 H ayat 2 dalam UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Isi pasal tersebut jelas menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam segala bidang.

Kebijakan kuota 30% merupakan awal keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk penghapusan deskriminasi pada partisipasi di ruang public antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk memberikan sumbangsih secara langsung dalam ruang politik yang akhirnya memunculkan calon-calon perempuan dalam pemilihan umum. Salah satu contohnya perempuan menjadi kepala desa beberapa daerah di Indonesia. Ini membuktikan perempuan telah berhasil mejadi pemimpin melalui pemilihan umum.

Partisipasi perempuan di dunia politik menduduki ranah yang beragam, salah satunya menjadi kepala desa. Hal tersebut bisa dilihat pada Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu khususnya di Desa Tompong Patu. Kecamatan tersebut mempunyai 19 desa. Satu-satunya desa yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Desa Tompong Patu.

---

<sup>3</sup> Irma, A. d. (n.d.). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia." *Social Work Journal*, 7(1), 73-78.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Tompong Patu, juga turut serta menyelenggarakan Pilkades. Desa dengan luas wilayah 11,96 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 2.876 jiwa, kepadatan penduduk 240 jiwa/km<sup>2</sup> yang diperebutkan oleh tiga kandidat calon kepala desa (cakades) kini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan undang-undang yang berlaku.

Pemilihan dilaksanakan pada 18 November 2021, tiga kandidat yang mengikuti pencalonan kepala desa diantaranya yang bersaing adalah dari kalangan milenial yaitu Andi Nilawati, Suriyanto dan Supriadi. Kemudian pemilihan dimenangkan oleh kandidat perempuan satu-satunya yaitu Andi Nilawati.

Keterpilihan Andi Nilawati calon kepala desa tersebut membuktikan bahwa adanya modal politik kuat yang ia gunakan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Menariknya lagi kepala desa yang terpilih ini merupakan calon petahana, yang artinya ia mampu menjaga dukungan dari masyarakat.

Kontestasi pemilihan kepala desa merupakan arena kompetisi diantara aktor politik guna mendapatkan legitimasi kekuasaan secara konstitusional, maka harus dibarengi dengan modal yang kuat. Keberagaman karakteristik dan modal yang dimiliki oleh kepala desa perempuan menyimpan potensi penelitian yang kaya untuk menggali lebih dalam dampaknya terhadap dinamika desa.

Andi Nilawati merupakan seorang lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan di jenjang karirnya ia juga memilih untuk terjun langsung ke ranah politik yakni sebagai Kepala Desa, yang sampai saat ini sudah berjalan dua periode. Hal ini membuktikan bahwa ia mampu menjaga dukungan dari masyarakat. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan terpilihnya kembali menjadi kepala desa merupakan modal simbolik untuknya terkait kepemimpinannya.

Prestasi seorang kepala desa sebagai lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Kesmas) menunjukkan keterampilan dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Andi Nilawati dapat membawa pendekatan holistik dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan dan kesejahteraan terkhususnya di Desa Tompong Patu.

Andi Nilawati yang di kenal mempunyai sikap sopan dan ramah ketika berhadapan dengan masyarakat. Keterlibatan bermasyarakat juga menjadi faktor utama dalam menjelaskan keterpilihan perempuan sebagai kepala desa. Dukungan dan penghargaan dari masyarakat setempat menciptakan pondasi kepercayaan dan respek, membentuk ikatan yang kuat antara kepala desa danarganya.

Latar belakang keterpilihannya sebagai kepala desa terkait erat dengan perubahan dinamika politik dan sosial di desa tersebut. Sebelumnya, kepemimpinan di desa ini didominasi oleh laki-laki, seperti Andi Hamdan dan Andi Mappanessa, yang memiliki reputasi kuat dalam komunitas. Namun, dengan munculnya Nilawati sebagai kandidat perempuan, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan inklusivitas gender dalam proses politik, tetapi juga membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan. Andi Nilawati membawa semangat baru dalam masyarakat, dengan fokus pada partisipasi publik, kesetaraan gender, dan pembangunan

inklusif. Keterpilihannya sebagai kepala desa menandai titik balik dalam sejarah politik desa, di mana perempuan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Dengan dukungan luas dari masyarakat dan semangat yang kuat untuk menciptakan perubahan positif, Nilawati membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Desa Tompong Patu.

Meski di awal pembahasan disebutkan bahwa politik perempuan di Kabupaten Bone terbilang masih minim, Andi Nilawati berhasil membuktikan bahwa ia mampu mendapat berbagai kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Andi Nilawati menjadi Kepala Desa di Desa Tompong Patu.

Sebagai pemimpin, keterpilihan Andi Nilawati merupakan sesuatu yang menarik ditengah budaya patriarki yang mengakar di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone. Fenomena ini merupakan wujud keterlibatan perempuan di ranah politik. Andi Nilawati juga merupakan kepala desa perempuan pertama di desanya. Berdasarkan pemaparan di atas penulis melihat adanya hal menarik dalam fenomena tersebut sehingga tertarik untuk mengkaji tentang “**Keterpilihan Andi Nilawati Menjadi Kepala Desa Di Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tersusun, peneliti merangkum rumusan yakni, apa penyebab Andi Nilawati mampu menjadi Kepala Desa Di Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penyebab Andi Nilawati mampu menjadi Kepala Desa Di Desa Tompong Patu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1. Manfaat Teoritik**, menunjukkan secara ilmiah mengenai penyebab Andi Nilawati mampu menjadi Kepala Desa, sebagai kepala desa. Selain itu dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan mengenaik ilmu politik.
- 2. Manfaat Praktis**, memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami penyebab Andi Nilawati mampu menjadi Kepala Desa, serta sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan konsep-konsep yang disesuaikan dengan topik, judul, dan fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan studi dan kajian. Konsep-konsep yang dibahas adalah konsep keterpilihan dan konsep teori modal simbolik. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

#### **1.1 Konsep Keterpilihan**

Keterpilihan adalah tingkat daya tarik atau kemampuan suatu objek untuk dipilih oleh publik, baik itu orang, partai politik, barang, atau jasa. Konsep keterpilihan sering dibicarakan pada masa menjelang pemilihan umum dan menjadi kriteria penting dalam menentukan calon yang akan dipilih. Untuk meningkatkan elektabilitas, objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Elektabilitas politik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh partai politik dan semakin diperbincangkan menjelang masa-masa pemilihan calon legislatif dan pemilihan umum. Saat elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih tinggi.

Dalam konteks politik, keterpilihan merujuk pada proses pemilihan umum di mana pemilih memilih calon atau partai politik yang mereka anggap paling sesuai dengan pandangan atau kepentingan mereka. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dianggap terpilih dan menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, anggota parlemen, atau kepala pemerintahan lokal.

Keterpilihan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti preferensi individu, nilai-nilai, penilaian, dan informasi yang tersedia. Ini juga dapat berubah seiring waktu dan pengalaman. Dalam konteks politik, keterpilihan juga dapat dipengaruhi oleh kampanye politik, pesan, dan isu-isu yang diperdebatkan selama pemilihan. Dalam bisnis, perusahaan sering berusaha untuk meningkatkan keterpilihan produk atau merek mereka melalui pemasaran dan pengembangan produk yang tepat.

Keterpilihan dikatakan juga sebagai elektabilitas karena elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa, orang, maupun badan atau partai. Elektabilitas politik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh partai politik dan semakin diperbincangkan menjelang masa-masa pemilihan calon legislatif dan pemilihan umum. Saat elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas, maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Partai politik dikatakan memiliki elektabilitas jika memiliki daya pilih yang sesuai dengan kriteria keterampilan dan popularitas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hukumonline.com, "*Makna Elektabilitas dalam Politik*".  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-elektabilitas-dalam-politik-lt63916dc27375f/>.  
Diakses pada tanggal 04 Juni 2023

Elektabilitas politik adalah tingkat keterpilihan partai atau politikus dalam pemilihan, seperti pemilihan umum atau pemilu. Elektabilitas ini dipengaruhi berbagai hal, rekam jejak partai atau politikus, hingga upaya kampanye. Semakin populer suatu partai atau politikus, makin tinggi pula elektabilitas. Elektabilitas partai politik maupun politikus bisa ditingkatkan melalui kegiatan kampanye menjelang pemilihan.

Elektabilitas dalam politik adalah kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Elektabilitas bisa diterapkan pada banyak hal, seperti barang, jasa, badan maupun partai. Semakin tinggi nilai elektabilitasnya maka semakin tinggi pula daya pilih seseorang atau partai tersebut.<sup>5</sup>

## **2.1 Kekuatan Modal Politik Andi Nilawati pada Pemilihan Kepala Desa**

Andi Nilawati, seorang kandidat perempuan yang memiliki kekuatan luar biasa dalam pemilihan kepala desa, memperlihatkan modal yang kuat dalam dirinya. Modal yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada kekayaan materi atau jabatan, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis, mengembangkan teori modal yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hierarki sosial dipengaruhi oleh kepemilikan modal budaya, sosial, dan ekonomi.

Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini menggunakan Teori Modal simbolik Piere Bourdiue. Teori modal dicetuskan pertama kali oleh Piere Bourdieu. Disebutkan bahwa teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Dalam masyarakat politik tentu persoalan dominasi adalah persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku.<sup>6</sup>

Modal menurut Bourdiue (2010) adalah sebuah hasil pekerjaan yang terakumulasi. Modal berada dalam bentuk yang ‘terbendakan’ atau ‘menubuh’ dalam istilah lainnya. Modal terjiwai dalam diri seseorang. Dalam ranah atau field kontestasi atau pertarungan social, modal dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan atau mengubah struktur lingkungan atau sosialnya.

Pemakaian kata modal mengingatkan pada metafora ekonomi untuk memahami kehidupan social (Jenkins, 2016). Modal dikategorikan sebagai kekuatan yang spesifik yang berada atau berooperasi dalam ranah. Setiap ranah tertentu mengharuskan seseorang untuk memiliki modal khusus. Bourdiue mencirikan bahwa modal harus terakumulasi melalui model investasi. Modal tersebut bisa diberikan kepada orang lain melalui warisan atau keuntungan adalah

---

<sup>5</sup> Nivita Saldyni, “Mengenai Istilah Elektabilitas dalam Dunia Politik” (<https://www.urbanasia.com/news/mengenai-istilah-elektabilitas-dalam-dunia-politik-U52729>, Diakses pada tanggal 12 September 2023, 07:57)

<sup>6</sup> Abd. Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Yogyakarta: LP2B, 2014), 108

ciri lainnya dari modal. Modal akan dipertaruhkan dalam sebuah kontestasi atau sebuah pertarungan.

Modal harus ada dalam setiap ranah, agar ranah mempunyai arti. Legitimasi aktor dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan modal yang lainnya, modal juga dapat diakumulasi antara modal yang satu dengan yang lain. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah.<sup>7</sup>

Contoh ini dapat dilihat di Negara Indonesia dari kecenderungan para pengusaha menjadi terjun di bidang politik. Pengusaha yang mempunyai modal ekonomi berlomba untuk merebut kursi di legislatif maupun di eksekutif. Modal ekonomi yang dimiliki para pengusaha ditukar menjadi modal sosial (untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan dalam arti luas). Selain dipertukarkan, juga terjadi pengakumulasian modal sebab seorang pengusaha yang sudah memiliki modal ekonomi bertambah lagi dengan modal sosial karena dia berhasil sebagai pejabat publik. Pengusaha yang awalnya mempunyai satu macam modal, menjadi mempunyai lebih dari satu macam modal sekaligus yaitu modal ekonomi, modal sosial dan juga modal simbolik.

Menurut Pierre Bourdieu, modal adalah sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Modal merupakan *energy social* yang hanya berada dalam arena dimana sesuatu memproduksi atau mereproduksi. Bourdieu membahas mengkategorikan modal dalam empat jenis yakni (1) modal ekonomi; (2) modal kultural (yang dapat berupa berbagai pengetahuan yang sah; (3) modal sosial (hubungan yang bernilai dengan individu lainnya); (4) dan modal simbolik. Keempat modal tersebut memungkinkan untuk menciptakan atau membentuk struktur sosial.<sup>8</sup>

### 3.1 Teori Modal Simbolik

Dalam melihat keterpilihan Andi Nilawati sebagai Kepala Desa, modal simbolik menjadi kunci bagi keberhasilan seorang kandidat. Modal simbolik mencakup reputasi, citra, dan identitas seseorang dalam masyarakat. Modal simbolik tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik dimaknai sebagai kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi. Modal simbolik menurut Bourdieu dapat berupa prestise dan juga dapat berupa bentuk 'citra' sebagai hal yang mampu ditukar dengan keuntungan dalam aspek ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Harker, Richard, dkk. (ed.). 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. (Pipit Maizier Pentj.)*. Yogyakarta: Jalasutra.

<sup>8</sup> Huda, H.d (2021). "Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik sebagai Representasi Pelanggungan Kekuasaan dalam Novel The President Karya Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bordique)." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 20-21.

<sup>9</sup> Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power. *Jurnal Poetika*, 3(2), 156-157.

Sumber modal simbolik ini merupakan segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi. Jenis sumber daya ini dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik, dimana sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti kedudukan, jabatan, gelar, keluarga ternama, kepunyaan barang dan benda mewah, dan lainnya. Modal simbolik yang dimiliki seseorang dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Dimana simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk dapat mengkonstruksikan realitas, serta mampu mengiring orang untuk dapat mempercayainya, mengakui, dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, kelompok, sebuah organisasi partai politik, atau sebuah bangsa.<sup>10</sup>

Modal simbolik menurut Bourdieu ini didefinisikan secara luas, mencakup pengakuan terhadap simbol-simbol tertentu yang mencerminkan kekuasaan, misalnya mobil, gelar, status sosial yang tinggi. Modal simbolik, yakni simbol kebudayaan yang dapat memperkuat kedudukan aktor politik diantara aktor politik yang lainnya atau dapat juga didefinisikan sebagai penghargaan yang telah didapatkan oleh aktor (Sjaf, 2014). Bourdieu melihat modal simbolik atau symbolic capital (seperti : harga diri, martabat, atensi) merupakan sumber kekuasaan yang krusial.<sup>11</sup>

Modal simbolik mengacu pada drajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan di bangun di atas dialektika pengetahuan dan pengenalan. Modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sepiionnya, namun bisa juga petunjuk petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya.

1. Prestise (*Prestige*) : Modal simbolik dalam bentuk prestise muncul dalam barang atau sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai nilai yang mampu menaikkan keuntungan pada seseorang. Prestise juga merupakan bentuk kapital simbolik yang terkait dengan pengakuan, hormat, atau penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan status sosial dan dapat diperoleh melalui pencapaian dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, atau bisnis. Sumber prestise dapat berasal dari pencapaian pribadi, karya yang diakui, atau asosiasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki reputasi tinggi.
2. Ketersohoran (*Notoriety*) : Ketersohoran adalah bentuk lain dari modal simbolik, tetapi dalam hal ini, terkait dengan ketenaran atau reputasi buruk. Ini adalah pengakuan negatif yang bisa didapat seseorang melalui perilaku

---

<sup>10</sup> Halim, A. (2014). *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube Modal dan Panggung)*. LP2B.

<sup>11</sup> Fatwa Nurul Hakim (2016). *Modal simbolik dalam strategi membangun kepercayaan pelaku onlineshop*. Jurnal Kajian Administrasi Negara, 4(1), 85.

kontroversial, tindakan ilegal, atau kontroversi publik. Sumber ketersohoran mungkin berasal dari media, berita, atau gosip.

3. **Konsekrasi (*Consecration*)** : Konsekrasi merujuk pada proses di mana masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu memberikan status khusus atau pengakuan terhadap individu atau karya mereka. Ini dapat terjadi melalui penghargaan, pengakuan resmi, atau penugasan status tertentu dalam bidang seperti seni, sastra, atau sains. Sumber konsekrasi adalah lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan penghargaan atau pengakuan.
4. **Kehormatan (*Honor*)** : Kehormatan dalam konteks modal simbolik Bourdieu terkait dengan bagaimana individu atau kelompok dapat mempertahankan reputasi dan martabat mereka dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan etika, norma, atau kode perilaku yang dianggap penting dalam budaya tertentu. Sumber kehormatan dapat berasal dari nilai-nilai budaya, norma sosial, atau kode etik.

Semua konsep ini, menurut Bourdieu, mencerminkan bagaimana modal simbolik memainkan peran penting dalam menentukan posisi sosial dan status individu dalam masyarakat. Modal simbolik ini dihasilkan, dipertahankan, atau diubah melalui interaksi sosial dan pengakuan dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam budaya dan masyarakat tertentu.<sup>12</sup>

#### 4.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang faktor memenang keterpilihan perempuan sebagai kepala desa atau yang berhubungan dengan keterpilihan perempuan sebagai kepala desa. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

1. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan **Dita Amalia Safitri** dengan judul skripsi **Modal Sosial Dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018**. Penelitian ini menganalisis bagaimana kekuatan dan pemanfaatan modal sosial Umi Azizah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangannya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial sebagai jaringan sosial yang dimiliki Umi Azizah dalam mengikuti Pilkada Kabupaten

---

<sup>12</sup> Nanang Krisdinanto. 2014. *Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 203-204..

Tegal tahun 2018 adalah posisinya sebagai seorang santri dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Ketua PC Muslimat NU sekaligus mubalig, dan incumbent. Jaringan sosial tersebut dimanfaatkan secara optimal menjadi jaringan politik melalui konsolidasi antar jaringan dan interaksi yang intens dengan masyarakat.

2. Penelitian kedua dilakukan **oleh Fikhri andhito Putra, Haniah Hanafie** dengan judul **Modal Sosial Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Studi Terhadap Tokoh Wandu Sebagai Calon Kepala Desa Di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Tahun 2019)**. Wandu, salah seorang warga Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, telah memberanikan diri mengikuti Pemilihan Kepala Desa (pilkades), meskipun modal sosial yang dimilikinya tidak mumpuni, karena status Wandu hanya sebagai seorang mekanik TV dan harus beraing dengan calon kepala desa lain dengan modal sosial yang lebih mumpuni. Penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis modal sosial dalam Pemilihan Kepala Desa dengan studi kasus seorang tokoh bernama Wandu sebagai calon pilkades, di Desa Susukan pada tahun 2019. Teori modal sosial dan motivasi digunakan sebagai pisau analisis. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan telaah dokumen. Sedangkan key informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun dengan modal sosial yang tidak mumpuni, karena hanya sebagai seorang mekanik TV, pendidikan tidak tinggi dan tidak memiliki kekayaan, jika dibandingkan dengan calon kepala desa lainnya, tetapi motivasi kuat membuat Wandu memberanikan diri untuk mengikuti pilkades di Desa Susukan, meskipun akhirnya kalah. Modal sosial Wandu tidak mumpuni, karena sangat jauh berbeda dengan kedua calon lainnya. Kemampuan finansial, strategi “lurus” (non money politics) dan orientasi masyarakat yang masih bersifat pragmatis merupakan faktor kenadala kemenangan Wandu dalam pilkades 2019 di Desa Susukan. Kesimpulan bahwa meskipun Wandu kalah dalam pilkades, tetapi Wandu telah menanamkan pembelajaran moral bagi masyarakat.

Dari penelitian diatas, persamaan penelitian ini adalah titik fokus yang sama-sama membahas tentang modalitas dalam kontestasi politik. Tetapi yang membedakan penelitian ini, adalah spesifik teori, serta objek dan subjek penelitian.

## **5.1 Kerangka Pemikiran**

Keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis. Kebijakan kuota 30% merupakan awal keikutsertaan perempuan dalam politik di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil. Partisipasi perempuan di dunia politik menduduki ranah yang beragam, salah satunya menjadi kepala desa. Hal tersebut bisa dilihat pada Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu khususnya di Desa Tompong Patu. Kecamatan tersebut

mempunyai 19 desa. Satu-satunya desa yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Desa Tompong Patu.

Andi Nilawati merupakan seorang lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan di jenjang karirnya ia juga memilih untuk terjun langsung ke ranah politik yakni sebagai Kepala Desa, yang sampai saat ini sudah berjalan dua periode. Hal ini membuktikan bahwa ia mampu menjaga dukungan dari masyarakat. Mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan terpilihnya kembali menjadi kepala desa merupakan modal simbolik untuknya terkait kepemimpinannya.

Kontestasi pemilihan kepala desa memang merupakan arena kompetisi diantara aktor politik guna mendapatkan legitimasi kekuasaan secara konstitusional. maka harus dibarengi dengan modal yang kuat. Modal dalam hal ini sifatnya sangat bervariasi tetapi yang lebih umum ditonjolkan oleh aktor adalah modal politik termasuk modal simbolik.

Menurut Pierre Bourdieu, modal simbolik tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan simbolik. Modal simbolik dapat berupa prestise dan juga dapat berupa bentuk 'citra' maupun 'kehormatan' sebagai hal yang mampu ditukar dengan keuntungan dalam aspek ekonomi.

Andi Nilawati yang dipilih kembali menjadi seorang pemimpin di desanya merupakan salah satu modal simbolik, bisa dilihat dari kepemimpinannya, kinerjanya dan segala aspek yang dimilikinya. Andi Nilawati juga di kenal sebagai seorang perawat yang penuh dedikasi, sehingga ia telah membantu banyak warga dalam merawat kesehatan mereka dengan penuh kepedulian. Hal inilah menjadikannya mampu mengolah masyarakat lebih dekat dengannya.

Penulis melihat bahwa keterpilihan Andi Nilawati sebagai Kepala Desa di Desa Tompong Patu memiliki sumber daya yang digunakan sebagai modal politiknya menjadi kepala desa. Modal yang dimaksudkan adalah modal simbolik seperti prestise dan kehormatan. Modal politik itu digunakan sebagai kekuatan dalam pemilihan kepala desa periode 2021-2026.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggambarkan bagaimana Andi Nilawati bisa menjadi kepala desa. Mengingat bahwa kepala desa tersebut adalah seorang perempuan yang berhasil mengalahkan para calon yang lain sekalipun itu laki-laki menjadikan fenomena tersebut merupakan sesuatu yang menarik, pasalnya berada di tengah budaya patriarki yang sudah lama di kabupaten Bone. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti mengapa perempuan yang menjadi kepala desa di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Dengan menggunakan teori modal simbolik dan konsep keterpilihan yang mendukung topik pembahasan, maka dituangkan dalam skema pikir di bawah ini :

## 6.1 Skema Berfikir

